

Implementasi Kebijakan Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan***Implementation of Regional Development Planning and Finance Codification and Nomenclature Policy At the Environment and Land Service South Sumatra Province*****Riske Maida Putri^{1*}, Lisdiana², Arif Rahman Hakim³**¹ Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik, STISIPOL Candradimuka, Indonesia² STISIPOL Candradimuka, Indonesia³ STISIPOL Candradimuka, Indonesia*E-mail correspondences: kekemaidaputri@gmail.com***ABSTRAK**

Dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan terdapat masalah yang dihadapi seperti belum memahaminya PPTK terhadap kebijakan terbaru, kegiatan yang tumpang tindih dengan bidang lain serta masih banyak indikator kinerja dan *output* serta *outcome* kegiatan yang belum sesuai dengan peraturan terbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan sehingga permasalahan yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Metode penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif yang artinya data atau informasi dikumpulkan melalui wawancara terhadap informan dan menggunakan teori model George C. Edward III yang menggunakan 4 dimensi (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) untuk mendapatkan keberhasilan dalam implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai acuan kebijakan kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan belum optimal. Permasalahan tersebut terdapat pada indikator insentif yang belum memadai dan indikator *Standard Operational Procedures (SOPs)* yang belum sesuai dengan kebijakan terbaru sehingga membuat beberapa kegiatan masih tumpang tindih dengan kegiatan pada bidang lain.

Kata kunci: Implementasi, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian, Kebijakan**ABSTRACT**

In preparing the Strategic Plan (Renstra), the South Sumatra Province Environment and Land Agency faced problems such as the PPTK not understanding the latest policies and activities that overlapped with other fields, and there were still many performance indicators, outputs, and activity outcomes that were not in accordance with the latest regulations. This study aims to implement Minister of Home Affairs Decree Number 050–5889 of 2021 concerning the Results of Verification, Validation, and Inventory of Updating Classification, Codefication, and Regional

Development and Financial Planning Nomenclature as a Reference for the Codefication Policy and Regional Development Planning Nomenclature at the Environment and Land Agency of South Sumatra Province so that the problems encountered can be resolved. The research method that will be used is qualitative research, which means that data or information is collected through interviews with informants and uses the George C. Edward III model theory, which uses 4 dimensions (communication, resources, disposition, and bureaucratic structure) to obtain success in implementation. The results of the study show that the implementation of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 050–5889 of 2021 concerning Verification Results, Validation, and Inventory of Updating Classification, Codefication, and Regional Development and Financial Planning Nomenclature as a reference for codefication policies and regional development planning and financial nomenclature at the Environment and Land Agency of South Sumatra Province is not yet optimal. These problems are found in inadequate incentive indicators and Standard Operational Procedures (SOPs) indicators that are not in accordance with the latest policies, so that some activities still overlap with activities in other fields.

Keyword: *Implementation, Environment and Land Agency*

PENDAHULUAN

Perencanaan merupakan proses utama dalam sebuah organisasi untuk merumuskan strategi dan tujuan demi mencapai hasil yang optimal. Perencanaan strategik berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai organisasi, termasuk SKPD, untuk menentukan arah, tujuan, dan masa depan secara komprehensif.

Dalam pelaksanaannya, SKPD membuat program kerja yang telah disusun sedemikian rupa untuk mencapai tujuan organisasi. Namun, masih terdapat kesulitan dalam penyusunan program kerja yang di luar pemahaman. Oleh

di lapangan, ditemukan bahwa masih ada kekurangpahaman terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menyebabkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Kepala Bidang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dengan bidang teknis yang berbeda. Selain itu, masih terjadi penggunaan nomenklatur lama dalam mengusulkan kegiatan yang membuat terjadinya tumpang tindih dalam satu sub kegiatan,

karena itu, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050–5889 Tahun 2021

tentang pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah diperlukan sebagai pedoman untuk menyusun program kerja yang seragam dan tertib.

Pemutakhiran dilakukan dalam bentuk verifikasi dan validasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sesuai dengan pemetaan. Penerapan nomenklatur baru tersebut sangat diperlukan bagi perencana agar implementasi penerapannya dapat dilakukan dengan baik dan permasalahan baru yang muncul dapat diselesaikan secara efektif.

Setelah melakukan observasi seperti yang terjadi pada Program Kegiatan DLHP Prov. Sumsel.

Hidup dan Pertanian Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan adanya tumpang tindih pada program pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup. Selain itu, indikator kinerja, output, dan outcome yang digunakan oleh PPTK dalam pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan peraturan terbaru yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan, PPTK juga akan merumuskan indikator kinerja serta *output* dan *outcome* sebagai tujuan akhir dalam pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja serta *output* dan *outcome* juga masih belum sesuai dengan peraturan terbaru yang menjadi acuan implementasi kebijakan. Indikator Kinerja yang telah dirumuskan masih menggunakan nomenklatur lama sehingga dalam satu sub kegiatan terdapat lebih dari satu indikator, padahal dalam nomenklatur baru setiap satu sub kegiatan hanya terdapat satu indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut memengaruhi *output* dan *outcome* yang akan dicapai sehingga apabila indikator kinerja tidak sesuai dengan peraturan baru maka *output* dan *outcome* yang akan dicapai juga tidak sesuai.

Implementasi

Implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dianggap sangat penting dan memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan public. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan, ada empat isu penting yang harus diperhatikan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang saling terkait dan berkaitan. diharapkan dan tidak diharapkan.

Kodefikasi

Kodefikasi adalah proses pemberian kode dengan menggunakan huruf dan angka pada komponen data. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, kodefikasi digunakan untuk menyusun nomenklatur secara sistematis dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan daerah. Hal ini dilakukan untuk memudahkan identifikasi dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan keuangan daerah.

Nomenklatur

Nomenklatur adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti tata nama atau penamaan. Dalam konteks perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, nomenklatur dapat diartikan sebagai daftar nama program atau kegiatan secara sistematis yang digunakan sebagai referensi dalam penyusunan dokumen perencanaan. Istilah ini seringkali sama dengan klasifikasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan induktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai implementasi kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian kualitatif memfokuskan pada perilaku manusia, kepercayaan, pemikiran, dan persepsi. Peneliti menjadi instrumen kunci dalam pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara.

Defenisi Operasional

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi kebijakan kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan	<i>Komunikasi</i>	<i>Transmisi</i> Kejelasan Konsistensi
	Sumber Daya	Staf <i>Informasi</i> <i>Wewenang</i> <i>Fasilitas</i>
	Disposisi	Pengangkatan Birokrat Insentif Sikap Pembagian Kerja Pengelolaan Keuangan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Mengenai hasil penelitian terhadap implementasi kebijakan kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat tiga indikator yang terdapat pada dimensi komunikasi, yaitu indikator transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Indikator transmisi bertujuan untuk menyampaikan kebijakan yang telah dibuat kepada pelaksana kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan.

a. Transmisi

Menurut hasil wawancara dengan informan, indikator transmisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut sudah berjalan baik. Indikasi dari hal tersebut adalah PPTK pada DLHP Prov. Sumsel sudah mengetahui tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di DLHP Prov. Sumsel dan staf sudah mendapatkan penjelasan terkait pelaksanaan implementasi kebijakan serta telah memahami tentang kebijakan yang telah disampaikan.

b. Kejelasan

Indikator kejelasan bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan jelas, dan berdasarkan hasil wawancara dengan informan, pelaksana kebijakan sudah menerima informasi dengan jelas dan mengerti tujuan dari kebijakan tersebut.

c. Konsistensi

Sedangkan, indikator konsistensi bertujuan agar implementasi kebijakan dilaksanakan secara konsisten berdasarkan apa yang dianjurkan dalam kebijakan tersebut. Berdasarkan data dari wawancara

dengan informan, implementasi kebijakan tersebut telah memiliki informasi yang konsisten dan pelaksana kebijakan sudah memahami aturan yang ada pada kebijakan tersebut..

2. Sumber Daya

Menurut George C. Edward III, sumber daya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya yang cukup dan keterampilan yang ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Penelitian ini mengidentifikasi empat indikator dalam faktor sumber daya, yaitu staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

a. Staf

Staf menjadi kunci utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena tanpa staf yang berkualitas dan kuantitas memadai, implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan DPPKAD Prov. Sumsel telah memiliki staf yang memiliki kemampuan dalam hal pelaksanaan implementasi.

b. Informasi

Informasi yang tepat waktu dan tepat sasaran merupakan indikator penting dalam pelaksanaan kebijakan. Penyampaian informasi harus jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang menerima informasi. Dalam penelitian ini, informasi yang disampaikan terkait kebijakan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 dapat dipahami dengan baik oleh PPTK, sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan dengan baik.

c. Wewenang

Wewenang juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan harus mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat

sehubungan dengan Kebijakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021. Namun, berdasarkan hasil penelitian, informan menyatakan bahwa baik PPTK maupun staf pada DLHP Prov. Sumsel memahami dengan baik terkait wewenang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

d. Fasilitas

Fasilitas menjadi indikator penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021, fasilitas yang diperlukan adalah buku pedoman perencanaan program/kegiatan sebagai media informasi dan mempermudah PPTK dalam mencari program/kegiatan. Dalam penelitian ini, fasilitas yang tersedia pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan seperti wifi dan buku pedoman perencanaan program/kegiatan sudah cukup baik.

Dengan demikian, penelitian ini telah memberikan gambaran mengenai empat indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya dalam implementasi kebijakan Kebijakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 di DLHP Prov. Sumsel.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan publik. Selain memahami kebijakan yang akan dilaksanakan, pelaksana kebijakan juga harus memiliki kemampuan untuk melakukannya dan mencegah terjadinya bias. Variabel disposisi memiliki lima indikator menurut George C. Edward III, yaitu pengangkatan birokrat, insentif, sikap, pembagian kerja, dan pengelolaan keuangan.

a. Pengangkatan Birokrat

Pengangkatan birokrat menjadi indikator awal dalam disposisi, yang menunjukkan

kesiapan dan dedikasi staf terhadap kebijakan yang akan diimplementasikan. Pada pelaksanaan Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 di DLHP Prov. Sumsel, hasil wawancara mengungkapkan bahwa staf dan PPTK sudah memiliki dedikasi dan kesiapan yang cukup pada kebijakan tersebut.

b. Insentif

Indikator insentif berdasarkan Edward III, merupakan tambahan keuntungan bagi pelaksana kebijakan untuk mendukung implementasi kebijakan dengan baik. Di sisi lain, implementasi kebijakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan masih belum memiliki insentif yang memadai.

c. Sikap

Sikap para pelaksana kebijakan merupakan indikator yang berkaitan dengan keyakinan seseorang dan mendasari tingkah laku. Pada penelitian ini, para pelaksana kebijakan di DLHP Prov. Sumsel sudah memiliki sikap yang cukup baik terhadap kebijakan.

d. Pembagian Kerja

Pembagian kerja yang sesuai dan pengelolaan keuangan yang baik juga menjadi indikator dalam variabel disposisi. Berdasarkan hasil wawancara, PPTK di DLHP Prov. Sumsel telah memahami peran dan tugas dalam implementasi kebijakan, termasuk dalam pembagian kerja

e. Pengelolaan Keuangan

Indikasi dari hal tersebut adalah PPTK terhadap implementasi kebijakan tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan dapat mengelola keuangannya dengan baik dan efektif.

4. Struktur Organisasi

a. *Standard Operating Procedures (SOPs)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pada indikator Standard Operating Procedures (SOPs) pada implementasi kebijakan Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada DLHP Prov. Sumsel sudah cukup baik. Indikasi dari hal tersebut adalah sudah terdapat struktur organisasi dan SOP terhadap implementasi kebijakan tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Namun masih terdapat kendala yang memang tidak bisa dihindari yaitu beberapa kegiatan masih terdapat tumpang tindih dengan bidang lain karena pengaruh aturan tugas dan fungsi dinas yang lama sehingga diharapkan agar bisa merubah aturan tugas dan fungsi dinas.

b. Fragmentasi

Pada indikator fragmentasi pada implementasi kebijakan Kemendagri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan sudah baik. Indikasi dari hal tersebut adalah sudah terdapat wewenang tugas dan fungsi terhadap implementasi kebijakan tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan

sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 80 Tahun 2016.

Menurut Nurdin (2002), implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi akan dilaksanakan setelah perencanaan yang telah ditetapkan dan dapat dianggap sempurna atau telah sesuai kriteria. Implementasi bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem. Namun implementasi bukan hanya sekedar aktifitas, tapi suatu kegiatan/tindakan yang terencana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dalam keterkaitannya dengan definisi implementasi, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang kritis selama berjalannya kebijakan strategi suatu organisasi/unit kerja. Program kebijakan yang telah ditetapkan harus dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang telah disepakati bersama. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan (Birklan, 2001). Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan George C. Edwards III (1984: 1) bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcome bagi masyarakat. Model implementasi kebijakan yang berspektif top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III dinamakan Direct and Indirect Impact on Implementation. Dalam pendekatan teori ini terdapat empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur birokrasi (Edward III, 1984). Menurut George C. Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi

dan struktur birokrasi. Peralihan kepala daerah yang lama dengan kepala daerah yang akan memimpin selanjutnya membuat perangkat daerah harus menyiapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis pada Bab V tentang Implementasi Kebijakan Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah pada4. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut disebabkan masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Berikut disajikan beberapa kesimpulan dari penelitian ini.

1. Berdasarkan dimensi komunikasi, penyampaian informasi kebijakan melalui sosialisasi secara dua arah dengan cara mendatangi langsung masing-masing ruangan PPTK sudah sangat baik. Informasi kebijakan tersebut dapat diterima dengan jelas dan konsistensi sehingga PPTK dan staf dapat memahami dan mengerti terkait kebijakan tersebut.
2. Berdasarkan dimensi sumber daya, staf yang dimiliki PPTK telah memiliki kemampuan dalam pelaksanaan implementasi. Informasi telah tersampaikan dengan baik sehingga PPTK sudah mengerti terkait pelaksanaan penyusunan program kerja menggunakan kebijakan terbaru. PPTK juga sudah mengetahui wewenang dari kebijakan tersebut dan wewenang dari PPTK itu sendiri. Sedangkan pada fasilitas sudah cukup optimal karena subbagian perencanaan memberikan fasilitas berupa buku pedoman untuk memudahkan dalam penyusunan program kerja.
3. Berdasarkan dimensi disposisi, PPTK telah menunjuk staf sebagai pelaksana

implementasi kebijakan dengan baik. staf tersebut memiliki kompeten sebagai implementor. Namun terkait insentif belum ada karena belum ada aturan terkait insentif untuk implementasi kebijakan ini. PPTK dan staf juga memahami dan menerima aturan yang ada pada kebijakan tersebut serta mendukung penuh terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan. PPTK juga telah membagi tugas dengan baik pada bawahannya sehingga memahami peran tugas dan fungsinya dalam menjalankan implementasi kebijakan serta telah membagi kerja ke bawahannya dengan baik. Terkait pengelolaan keuangan sudah diatur dengan baik terkait kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan **dimensi struktur birokrasi**, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan telah memiliki SOP dan tugas dan fungsi yang sesuai aturan sehingga PPTK bekerja sesuai SOP dan tugas dan fungsi berdasarkan aturan yang ada. Namun dalam pengimplementasian kebijakan terdapat kendala saat menyusun program kerja. Beberapa kegiatan yang ada masih tumpang tindih dengan bidang yang lain dikarenakan aturan tugas dan fungsi yang ada belum menyesuaikan kebijakan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Agostiono. 2010. *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Jakarta: Rajawali Press
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung : Alfabeta
- Anwar, Mokhammad. 2019. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Arfiani, I. S. 2019. *Analisis Empiris Hubungan antara Ekspor, Impor, Nilai Tukar dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan

- Birkland, Thomas A. 2001. *An Introduction to the Policy Process*. NY: M.E Sharpe Inc Armonk
- Budi, S. C. (2011). *Manajemen Unit Kerja Rekam Medis*. Yogyakarta: Quantum Sinergis Media
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers
- Creswell, J. W. 2012. *RESEARCH DESIGN Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Damono. 2001. *Manajemen dan Tata Kerja Perpustakaan Sekolah*. Jakarta : PT.Grasindo
- Dannis, Gorgen B. 1984. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PT. Pustaka Binaan Presindo
- Edward III, George C. 1984. *Public Policy Implementing*, England: Jai Press Inc London
- Effendy, Khasan. 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Fattah, Nanang. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princnton University Press
- Grindle, Merilee S. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo, Yogyakarta: Mediaa Pressindo
- H. Pulzl dan O. Treib. 2007. *Implementing Public Policy: Hand Book of Public Policy Analysis, Theory, Politics, and Methods*. New York: CRC Press Taylor & Francis Group
- Habsyi, Sitti Husaebah Pattah. 2012. *Pengantar Tajuk Subjek dan Klasifikasi*. Makassar : UIN Alauddin
- Hariyanto. 2000. *Belajar dan Pembelajaran sebuah Teori dan Konsep Dasar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Herdiyanto, (2016). *Buku Ajarpsikologi Sosial I*. Denpasar. (Tidak diterbitkan)
- Husaini, Usman. 2006. *Manajemen, Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kania, Ikeu dan Widiawati, Windy. 2019. *Pengaruh Pembagian Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di UPTD Pasar Cisarupan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut*. Garut: Universitas Garut
- Leo Agustino. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Mar'at. 1984. *Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukurannya*. Jakarta: Balai Aksara
- Miles, M.B., Huberman, A.M., dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3*. USA: Sage Publications
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosida Karya
- Moleong, Lexy. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. remaja Rosdakarya.
- Mursalim, S. W. 2017. *Implementasi Kebijakan Smart City di Kota Bandung*. Bandung: Jurnal Ilmu Administrasi, 14, 126–138
- Mulyasa, E. 2013. *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Munir, Muhammad dan Ilahi, Wahyu. 2008. *Managemen Dakwah*. Jakarta: Kencana Rosda Karya
- Noor, Juliansyah. 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Prenada Group
- Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- Pakasi, Jeremia Deschiano. 2022. *Implementasi Peraturan Menteri*

- Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara.* Manado : IPDN
- Purba et al. 2021. *The Effect of Cash Turnover and Accounts Receivable Turnover on Return On Asset.* Jakarta: STEI Jakarta
- Purnama, Irma, Gedeona, Hendrikus T dan Nurliawati, Nita. 2022. *Strategi Implementasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung.* Bandung : Politeknik STIA LAN
- Purwanto dan Sulistyastuti. 1991. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan.* Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyan, Tabrani. 1994. *Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Sabatier, Paul. 1986. *Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research Journal of Public Policy.* UK: Cambridge University
- Sagala, Syaiful. 2009. *Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan.* Bandung : Alfabeta
- Sarosa, Samiaji. 2017. *Metodologi Pengembangan Sistem Informasi.* Jakarta: Indeks Jakarta
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan.* Jakarta: Balai Pustaka
- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian. 1995. *Metode Penelitian Survei.* Jakarta: LP3ES
- Soetandoyo, WS. 1996. *Metode Kualitatif Vs Metode Kuantitatif.* Surabaya: FISIP UNAIR
- Straus, Anselm, dan Corbin, Juliet. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.